



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

# LAPORAN KINERJA SETDITJEN PHL

2021

## KATA PENGANTAR



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021 merupakan hasil pengukuran kinerja dan sasaran atas pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Beberapa hal penting yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di tahun 2021 yaitu Diskusi Publik Jejak Tapak: Jejak Tapak: Meraih Asa di Masa Pandemi, Masyarakat Sejahtera, Puncak Festival Gender KLHK Tahun 2021, dan menyiapkan perubahan SOTK Ditjen PHPL menjadi Ditjen PHL.

Dalam rangka mendukung meningkatkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan data yang terekonsiliasi dari hulu sampai hilir dan pasar, Ditjen PHL terus mengembangkan Website Data Release Ditjen PHPL yang dibangun sejak bulan September 2017. Website Ditjen PHL saat ini beralamat di [phl.menlhk.go.id](http://phl.menlhk.go.id) telah bertransformasi menjadi Portal **Satu Data Ditjen PHL** yang dilengkapi dengan *Dashboard/Cockpit Indicator* Pengelola Hutan Lestari.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2021 ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2022



NIP. 19621212 199303 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Tantangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021.....	6
E. Sistematika Laporan Kinerja.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	8
B. Rencana Kerja 2021.....	9
C. Perjanjian Kinerja.....	11
D. Indikator Kinerja Kegiatan.....	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	13
A. Capaian Kinerja.....	13
B. IKK:1 Nilai SAKIP Ditjen PHL.....	13
C. IKK:2 Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL.....	52
D. IKK:3 Laporan keuangan Ditjen PHL.....	54
E. Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV Penutup.....	58
Lampiran.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.18/MenLHK-II/2015 .....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.15 Tahun 2021 .....	5
Gambar 3. Visi Misi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan .....	8
Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2021 .....	14
Gambar 5. Kegiatan Penguatan SAKIP 16-18 Juni 2021.....	15
Gambar 6. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.....	18
Gambar 7. Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan 17-19 Juni 2021 .....	19
Gambar 8. Indikator Partisipasi Satker pada Pelaporan Monev DJA .....	20
Gambar 9. Indikator Partisipasi Satker pada Sistem SPIP Online .....	20
Gambar 10. Puncak Festival Gender KLHK 2021 .....	23
Gambar 11. <i>Coaching Clinic</i> Pendalaman GAP GBS dan Penyusunan GAP GBS 202224.....	24
Gambar 12. Diskusi Publik 28 September 2021.....	25
Gambar 13. Grafik Permohonan Informasi Publik Ditjen PHPL Tahun 2021 .....	26
Gambar 14. Grafik Postingan Media Sosial Ditjen PHL Tahun 2021.....	26
Gambar 15. Buletin PHPL Edisi IX/2021 .....	27
Gambar 16. Screenshoot video Ditjen PHL Tahun 2021 .....	28
Gambar 17. Pembinaan Pegawai Ditjen PHL 21 Desember 2021 .....	31
Gambar 18. Rapat Juknis PEH.....	32
Gambar 19. Struktur Organisasi Ditjen PHL Tahun 2021.....	33
Gambar 20. Progres Reformasi Birokrasi Ditjen PHL.....	35
Gambar 21. FGD Permen LHK 8 Tahun 2021 .....	38
Gambar 22. Tahapan Penanganan Perkara pada PTUN .....	42
Gambar 23. . Pengelolaan BMN Setditjen PHL .....	48
Gambar 24. . Target Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Setditjen PHL .....	6
Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.....	9
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen PHL .....	11
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Tahun 2021.....	13
Tabel 5. Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016, 2017, 2018 , 2019 dan 2020.....	14
Tabel 6. Kenanikan Pangkat Tahun 2021 .....	29
Tabel 7. Permohonan Alih Tugas.....	29
Tabel 8. Usulan Pensiun 2021 .....	30
Tabel 9. Cuti Tahun 2021 .....	30
Tabel 10. Peraturan Direktur Jenderal PHL Tahun 2021 .....	37
Tabel 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 Bidang PHL.....	38
Tabel 12. Partisipasi Ditjen PHL pada <i>Event</i> Internasional Tahun 2021 .....	43
Tabel 13. Kerjasama Bidang PHL Tahun 2021 .....	46
Tabel 14. Hibah Ditjen PHL Tahun 2021 .....	47
Tabel 15. Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN secara Lelang .....	49
Tabel 16. Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN melalui Hibah ke Yayasan Pendidikan Jakarta .....	49
Tabel 17. Neraca Keuangan Ditjen PHL.....	51
Tabel 18. Rekapitulasi Laporan Keuangan Ditjen PHL.....	55
Tabel 19. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2021.....	56
Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Ditjen PHL Tahun 2021.....	57

## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2021, didapatkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **80,00** (kategori **BB : Sangat Baik**), dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
  - b. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **Level 3** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
  - c. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terealisasi **1 Laporan** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
2. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2021 sebesar Rp55.480.453.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp53.302.352.630,- (95,75%).
3. Efisiensi sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah sebesar **0,96** dengan kategori **Efisien**.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan data yang terekonsiliasi dari hulu sampai hilir dan pasar, serta mendukung peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan, Ditjen PHL terus mengembangkan Website Data Release Ditjen PHPL yang dibangun sejak bulan September 2017. Website Ditjen PHL yang saat ini beralamat di [phl.menlhk.go.id](http://phl.menlhk.go.id) telah bertransformasi menjadi Portal **Satu Data Ditjen PHL**, yang dilengkapi pula dengan *Dashboard/Cockpit Indicator* Pengelolaan Hutan Lestari. *Dashboard/Cockpit Indicator* Pengelolaan Hutan Lestari telah diluncurkan pada acara Rapat Koordinasi Teknis Ditjen PHL di Yogyakarta, pada tanggal 30 September 2021. Sosialisasi kepada publik juga dilaksanakan pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun KLHK pada tanggal 18 Desember 2021 di Jakarta.
5. Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dan untuk menjamin pelaksanaan implementasi PUG dalam setiap kegiatannya, hal ini telah tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024. Prinsip "*No One Left Behind*" dalam SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dimaknai sebagai perjalanan bersama sejumlah negara untuk melanjutkan program pembangunan global yang sebelumnya telah dirintis dalam MDGs (*Millenium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Millenium). Salah satu program yang dicetuskan untuk dilanjutkan dalam SDGs adalah dari sektor sumber daya manusia,

khususnya pada Kesetaraan Gender (tujuan SDGs kelima). Dengan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, pada lomba Pengarusutamaan Gender antar Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, Ditjen PHL didapuk sebagai **juara umum** pada **Gender Mainstreaming Competition (GENERATION)**. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pada acara Puncak Festival Gender tanggal 15 Desember 2021 merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Ditjen PHL dalam implementasi pelaksanaan pengarusutamaan gender.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai salah satu unit kerja Eselon II dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

### **B. Tugas dan Fungsi**

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggantikan Peraturan Menteri P.18 Tahun 2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan hutan lestari;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan hutan lestari;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengelolaan hutan lestari;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan administrasi kerjasama teknik serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan hutan lestari; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Setditjen PHL terdiri dari 2 (dua) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

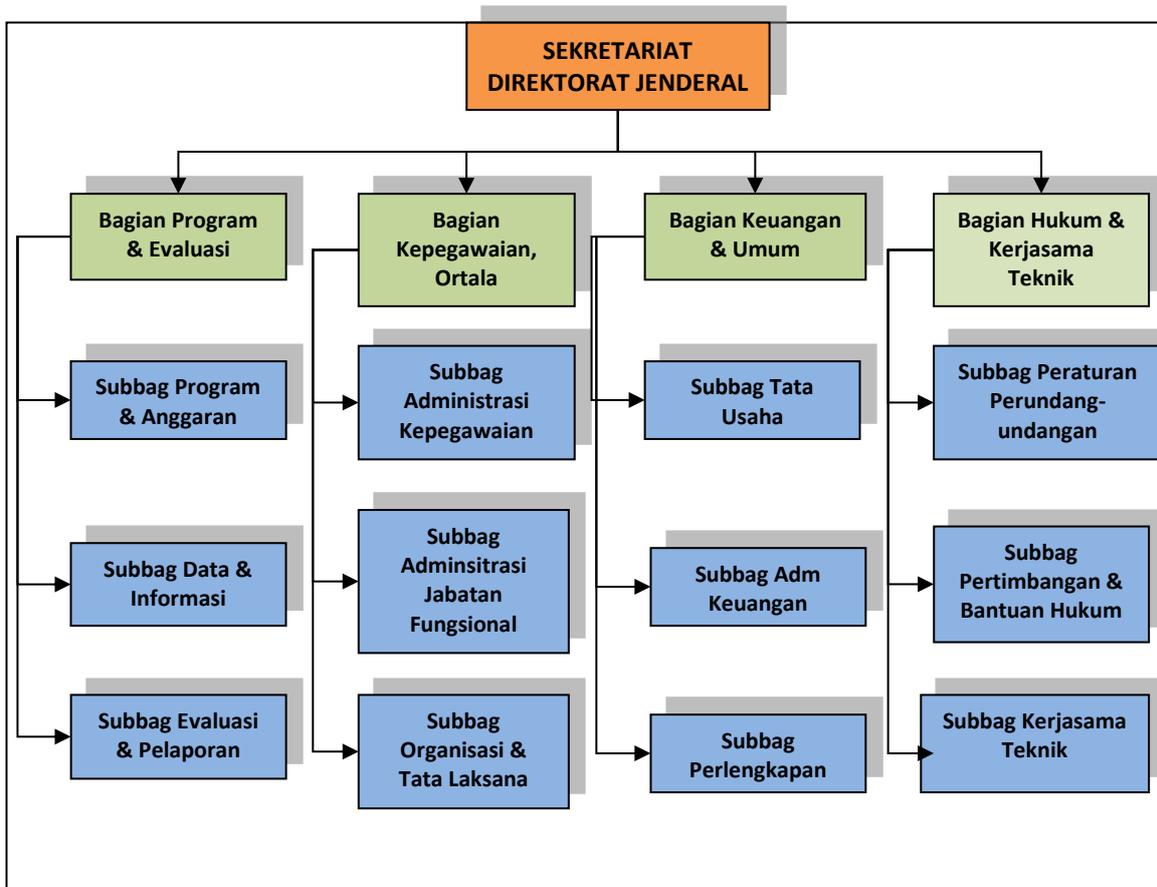
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

### C. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari disajikan pada Gambar 1 (organisasi lama) dan Gambar 2 (organisasi baru).

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.18/MenLHK-II/2015



Gambar 2. Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.15 Tahun 2021



## 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak 70 orang (PNS sebanyak 62 orang dan Honorer sebanyak 8 orang), dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga lulusan Strata Tiga (S3). Adapun rekapitulasi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan pendidikan tahun 2021 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Setditjen PHL

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
	Sekretariat Direktorat Jenderal PHL	1	15	30	10	13	1	-	70

Sumber : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2021)

## 2. Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.480.453.000,-.

### D. Tantangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021

Berdasarkan kajian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Ditjen PHL, sejak tahun 2015 Ditjen PHL bertekad bulat menyelamatkan hutan Indonesia dengan mencanangkan titik belok perubahan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Sebagai bentuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHL, Setditjen PHL bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dengan fokus : menyiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten; menyiapkan sarana kerja lebih modern; mengembangkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel serta mengembangkan pengawasan dan pengendalian dengan menggunakan teknologi; dan menyiapkan regulasi bidang pengelolaan hutan lestari. Keempat fokus kegiatan tersebut merupakan tantangan yang dihadapi Setditjen PHL untuk tercapainya tujuan organisasi Ditjen PHL secara keseluruhan.

### E. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, SDM, Isu Strategis 2021

## **2. Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar : Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, Indikator Kinerja Kegiatan

## **3. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja (IKK) sesuai Perjanjian Kinerja (PK), berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan analisis.

- Membandingkan
  - Antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
  - Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra;
  - Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/internasional (jika ada);
- Analisis
  - Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - Efisiensi penggunaan sumber daya;
  - Hal-hal yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

## **4. Bab. IV Penutup**

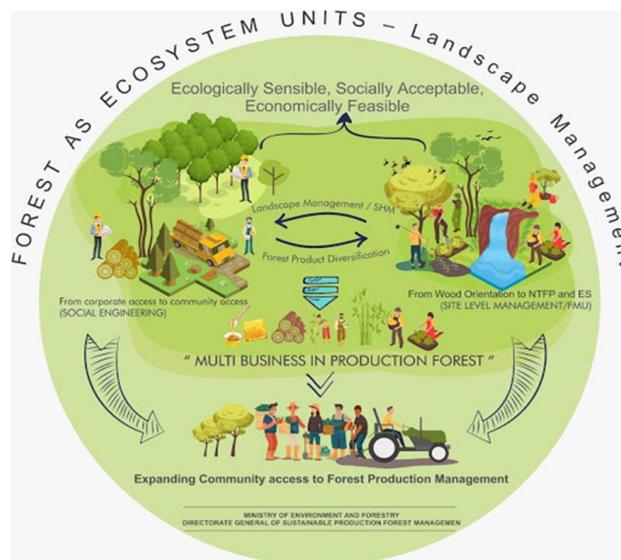
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Ditjen PHL memiliki visi "Terwujudnya Tata Kelola Hutan yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Produktivitas serta Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Visi Ditjen PHL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.

Gambar 3. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan



Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL : 1). Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 2). Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 3). Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai didalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024 dan dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL telah menyusun Sasaran Program :

1. Meningkatnya produktivitas hutan;
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan;
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu;

4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan;
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi;
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan;
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak;
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHPL 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" dan Program "Dukungan Manajemen". Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL. Program ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktorat Teknis lingkup Ditjen PHL.

Sekretariat Ditjen PHL mendukung pencapaian Sasaran Program Ditjen PHL Nomor 8 (SP-8) "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL" dengan Indikator Kinerja Program (IKP): Nilai SAKIP Ditjen PHL, melalui Program "Dukungan Manajemen". Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari". Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Sekretariat Ditjen PHL dalam periode tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL". Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Setditjen yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai oleh Setditjen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Ditjen PHPL	Poin	79	80	81	82	83
Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL	Level	3	3	3	4	4
Laporan Keuangan Ditjen PHPL yang Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan	1	1	1	1	1

## B. Rencana Kerja 2021

Pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan tahun 2020-2024 tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi dari hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya pada hutan produksi di dalam suatu pengelolaan multi bisnis/multi

usaha. Tujuan pengelolaan multi bisnis/multi usaha adalah agar dapat diperoleh manfaat yang optimal, baik dari aspek lingkungan, sosial/budaya maupun ekonomi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 yang menjadi penentu arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun berikutnya, sehingga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan hutan produksi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PHL tahun 2021 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN sebelumnya dan juga bertujuan untuk meletakkan pondasi pembangunan hutan produksi untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045.

Pendekatan perencanaan yang dilakukan oleh Ditjen PHL dalam menyusun Renja Pembangunan Hutan Produksi tahun 2021 diselaraskan dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 meliputi:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 secara Nasional mempunyai tema utama "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas";
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir ke dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah

Ditjen PHL sebagai Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 1 (satu) Prioritas Nasional pada Tahun 2021, yaitu: Prioritas Nasional (PN) Nomor 1 "Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan" dengan Program Prioritas (PP) Nomor 2 "Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi" dan PP Nomor 6 "Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Strategi yang dilakukan Ditjen PHL melalui optimalisasi hasil hutan untuk meningkatkan PNBP, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan

### C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Sekretaris Ditjen PHPL dengan Direktur Jenderal PHPL sebagaimana Lampiran 1, Sekretaris Ditjen PHPL bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program "Dukungan Manajemen" dengan Kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL". Untuk mengukur keberhasilan setiap pencapaian program dan kegiatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kinerja Program "Dukungan Manajemen" dapat diketahui berdasarkan capaian IKP Nilai SAKIP Ditjen PHPL (80 poin), sedangkan untuk kinerja Kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL" didasarkan atas pencapaian IKK, antara lain:

1. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (80 Poin);
2. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Level 3);
3. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (1 Laporan);

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Sumber Dana Rupiah Murni (RM). DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari TA. 2021 cq. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari TA. 2021 berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor : SP.DIPA-029.03.1.465007/2021 tanggal 23 November 2020, adalah sebesar Rp55.480.453.000,-.

### D. Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PHPL dengan Dirjen PHPL Tahun 2021, Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen PHL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen PHPL	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	80 Poin
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Level 3
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen PHL tahun 2021 memiliki perbedaan dibandingkan Tahun 2020 yang memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari: 80 poin.
2. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari: Level 3.
3. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan: 1 Laporan.
4. Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan: 1 Layanan.
5. Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan: 1 Layanan.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2021.

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021, dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PHL Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen PHPL	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	80 Poin	80 Poin	100,00
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Level 3	Level 3	100,00
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan	1 Laporan	100,00

#### B. IKK 1 : Nilai SAKIP Ditjen PHPL

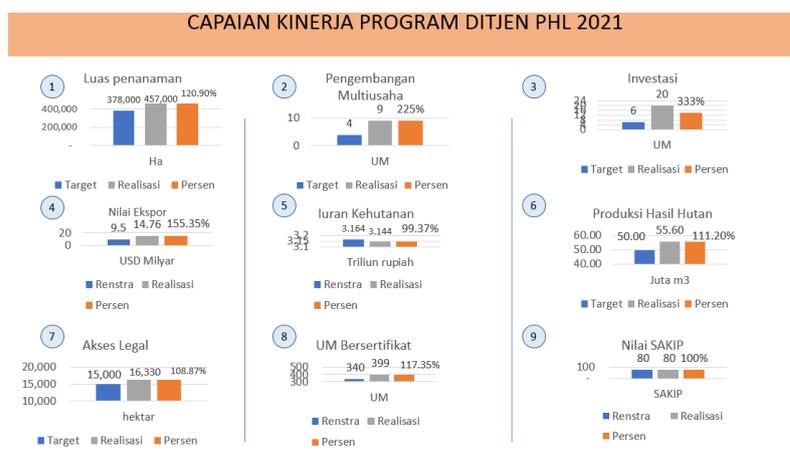
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tim Inspektorat Jenderal Nomor : SP.117/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/6/2021 tanggal 28 Juni 2021, secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen PHL adalah sebesar 80,00 poin (Sangat Baik), dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016, 2017, 2018 , 2019 dan 2020

No.	Komponen	Nilai Maksimum	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50	23,87	24,02	25,01	22,53
2	Pengukuran Kinerja	25	19,41	19,47	20,91	21,36	21,93
3	Pelaporan Kinerja	15	10,69	11,53	12,78	13,67	12,18
4	Evaluasi Internal	10	4,86	5,17	6,67	8,13	7,61
5	Pencapaian Kinerja	20	13,15	13,15	13,32	10,83	15,75
Jumlah Total		100	70,61	73,19	77,70	79,00	80,00

Nilai SAKIP Ditjen PHPL **meningkat** dibandingkan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Nilai komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal menurun dibandingkan tahun 2019. Hal ini mengingat pada tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024, dimana terdapat beberapa hal yang belum selaras dengan Renstra KLHK, dan hal ini akan disempurnakan sekaligus menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi. Pencapaian Kinerja pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk meningkatkan nilai komponen "Pencapaian Kinerja" Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah beberapa kali melaksanakan evaluasi di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap capaian kinerja Ditjen PHL diperlukan, agar walaupun berada pada situasi pandemi Covid-19, capaian kinerja Ditjen PHL tidak mengalami kendala. Capaian kinerja Program Ditjen PHL tahun 2021 seluruhnya telah sesuai/melebihi target kinerja.

Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2021



Catatan : Data capaian masih dalam proses pengolahan

Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP di lingkup Ditjen PHL, juga telah dilaksanakan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada tanggal 17-19 Juni 2021, yang dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan fasilitas *zoom cloud meeting*. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan satker pusat dan daerah, dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Wilayah III Itjen.

Gambar 5. Kegiatan Penguatan SAKIP 16-18 Juni 2021



Rincian pelaksanaan kegiatan untuk setiap komponen kegiatan diuraikan sebagai berikut :

## 1. Bagian Program dan Evaluasi

### a. Pembahasan Draft Revisi Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 Pasca Perubahan SOTK Ditjen PHL

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, memberikan tambahan tugas dan fungsi pengelolaan hutan lindung dan pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL). Hal ini berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Ditjen PHPL menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL). Perubahan SOTK Ditjen PHL tersebut memberikan konsekuensi atas perubahan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHPL tahun 2020-2024. Oleh karena itu Direktur Jenderal PHL membentuk Tim Penyusun Revisi Renstra Ditjen PHL tahun 2020-2024 sesuai Surat Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.38/PHPL/Set.5/Ren.0/8/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Penyusunan dan pembahasan draft Revisi Renstra Ditjen PHL tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Ditjen PHL dengan Narasumber dari BAPPENAS dan Biro Perencanaan KLHK pada tanggal 18 s.d 20 Agustus 2021 di Bogor dengan mempedomani draft Revisi Renstra Kementerian LHK tahun 2020-2024. Hasil pembahasan penyusunan draft Revisi menghasilkan konsep *cascading* Renstra Ditjen PHL tahun 2020-2024.

**b. Penelaahan Pagu Indikatif RKAKL TA 2022**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juni 2021 di Bogor dengan peserta berasal dari Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran dan Satker lingkup Ditjen PHL. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* yaitu pembahasan secara faktual (*offline*) secara terbatas dan secara virtual (*online*).

**c. Penelaahan Pagu Anggaran RKAKL TA 2022**

Kegiatan penelaahan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 secara *online* yang diikuti bersama oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran), BAPPENAS (Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Perencanaan) bersama dengan satker lingkup Ditjen PHL.

**d. Penelaahan Pagu Alokasi RKAKL TA 2022**

Kegiatan penelaahan ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 26 Oktober 2021 secara *online* menggunakan Aplikasi SAKTI oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran), BAPPENAS (Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Perencanaan) bersama dengan satker lingkup Ditjen PHL.

**e. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Perizinan berusaha dengan multiusaha kehutanan diharapkan akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip kelestarian ekonomi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. Multiusaha kehutanan yang diberikan disesuaikan dengan dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang.

Untuk itu Ditjen PHL melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dengan Tema "Menata Kembali Kawasan Hutan Indonesia" pada tanggal 30 September s.d 2 Oktober 2021 di Yogyakarta yang dilakukan secara *hybrid*, yaitu secara faktual (*off line*) secara terbatas dan secara virtual (*online*) dengan mengundang para pihak. Rapat koordinasi teknis bidang pengelolaan hutan lestari menghasilkan 7 (tujuh) rumusan, antara lain:

1. Pengelolaan hutan berbasis lanskap sebagai implementasi multiusaha kehutanan merupakan keniscayaan untuk meningkatkan produktivitas hutan dengan tetap

mempertimbangkan aspek sosial dan daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan.

2. Peran Ditjen PHL bersama Pemerintah Daerah dan stakeholder sangat strategis, sehingga harus menjadi *market driven* dengan menempatkan pasar dan konsumen sebagai awal strategi pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan PDB sektor kehutanan dan devisa negara serta berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3. Ditjen PHL perlu mengakselerasi transformasi paradigma (*mindset*) dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari entitas bisnis menjadi pengelola hutan di tingkat tapak.
4. Ditjen PHL bersama stakeholder lain perlu mengintensifkan evaluasi kinerja usaha dan pengawasan serta pembinaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
5. Ditjen PHL bersama Eselon I lain dan Pemerintah Daerah perlu mempercepat peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai pemecah masalah resolusi konflik untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.
6. Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan memiliki peran penting dalam menjamin tertib peredaran hasil hutan sebagai instrumen untuk memastikan terpenuhinya hak-hak negara berupa PNBP dan keberlangsungan pengelolaan hutan yang lestari.
7. Produk hasil pengelolaan hutan lestari perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung industri, baik di hulu dan hilir yang dapat diterima pasar. Perlu alokasi dan distribusi yang proporsional agar terjadi keseimbangan kelestarian baik di hulu-hilir-pasar, sehingga diperlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk integrasi sistem dan klasterisasi.

Gambar 6. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Lestari



#### f. Pelaporan lingkup Ditjen PHL

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, terdapat beberapa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan pada tahun 2021 (baik laporan fisik maupun melalui sistem pelaporan) sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PHPL dan Ditjen PHPL tahun 2020;
- Penyusunan Laporan Bulanan dan Semester Pelaksanaan Kinerja Anggaran (monev DJA) tahun 2021;
- Penyusunan Laporan Bulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (monev Bappenas) tahun 2021;
- Penyusunan Laporan Kegiatan Prioritas Nasional;
- Penyusunan Laporan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Penyusunan Laporan Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja peningkatan pengetahuan/wawasan mengenai pelaporan e-monev DJA dan e-monev Bappenas, khususnya terkait beberapa kebijakan baru integrasi sistem pelaporan; memberi upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan yang selama ini sering terjadi pada sistem pelaporan; serta memberi pemahaman pentingnya ketepatan waktu pelaporan dan kualitas pelaporan; diselenggarakan beberapa kegiatan Koordinasi Pelaporan sebagai berikut :

- Pada tanggal 7-13 Januari 2021, dengan mengundang Kepala Subbagian Tata Usaha dan petugas pelaporan, baik dari satker pusat maupun daerah, yang diselenggarakan secara *online*. Narasumber pada kegiatan ini adalah :
  - Direktorat Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran – Kementerian Keuangan;
  - Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan – Kementerian Keuangan
- Pada tanggal 17-19 Juni 2021, dengan mengundang Kepala Subbagian Tata Usaha dan petugas pelaporan, baik dari satker pusat maupun daerah, bertempat di Jakarta;

Gambar 7. Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan 17-19 Juni 2021



Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan adalah dari :

- Direktorat Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran – Kementerian Keuangan;
- Inspektorat Wilayah III KLHK

Pelaksanaan kegiatan pelaporan *online* (monev DJA dan monev Bappenas) oleh satker lingkup Ditjen PHPL pada setiap bulan telah sesuai tata waktu pelaporan dan sampai dengan tanggal 6 Januari 2021, seluruh pelaporan online telah diselesaikan sesuai tata waktu pelaporan dan indikator partisipasi satker seluruhnya telah berwarna hijau.

Gambar 8. Indikator Partisipasi Satker pada Pelaporan Monev DJA

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	426882	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IV JAMBI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	426881	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH V PALEMBANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	426902	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VIII PONTIANAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	426911	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IX BANJARBARU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	426927	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XI SAMARINDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	426933	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II MEDAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	426964	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIII MAKASSAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	426979	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV AMBON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	465807	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JEMBRAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	413192	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	413200	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKAMPUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	413214	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH X PALANGKARAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	413221	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	413235	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XV JASAPURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	413242	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI BANDAR LAMPUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	413254	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VII DENPASAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	888013	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**g. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan, pemantauan, dan analisis penyelenggaraan SPIP pada satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal telah membangun aplikasi SPIP online. Berdasarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor : SE.03.Itjen/Setitjen/ Set.1/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP (penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP dan Pemantauan Kebijakan Pengendalian) dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPIP *online*. Dengan perubahan proses tersebut, satker lingkup Ditjen PHL sampai dengan Triwulan III tahun 2021, telah melaksanakan pelaporan secara *online* sesuai tata waktu yang tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambar 9. Indikator Partisipasi Satker pada Sistem SPIP Online

No	User Asesli	Survey 1 smpng	Rencana Tindak	Identifikasi Risiko	Wilayah Risiko	Analisa Risiko	Kebijakan Pengendalian & GCP	Indikator
1	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Dit. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Dit. Usaha Hutan Produktif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Dit. Usaha Jasa Lingkungan dan HMBK Hutan Produktif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Dit. Iuran dan Penederahan Hasil Hutan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	EPHP Wilayah III Pekanbaru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	EPHP Wilayah II Medan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	EPHP Wilayah I Banda Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	EPHP Wilayah IV Jambi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	EPHP Wilayah V Palembang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	EPHP Wilayah VII Bandar Lampung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	EPHP Wilayah VIII Denpasar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	EPHP Wilayah VIII Pontianak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	EPHP Wilayah IX Banjarbaru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	EPHP Wilayah X Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	EPHP Wilayah XI Samarinda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	EPHP Wilayah XII Palu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	EPHP Wilayah XIII Makassar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	EPHP Wilayah XIV Jember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	EPHP Wilayah XV Jayapura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	EPHP Wilayah XVI Manokwari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pemantauan Kebijakan Pengendalian dan Informasi Komunikasi Triwulan IV 2021 dan penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP tahun 2022 akan diselesaikan paling lambat tanggal 20 Januari 2022. Rangkaian penyelenggaraan SPIP tahun 2021 diawali dengan pelaksanaan survey Lingkungan Pengendalian dan Sekretariat Ditjen PHL telah melaksanakan survey Lingkungan Pengendalian tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021 – 7 Januari 2022, dengan jumlah responden sebanyak 56 pegawai ASN.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala BPKP nomor 5 tahun 2021 mengenai Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Setditjen PHL menyelenggarakan internalisasi dan bimbingan teknis kepada tim satuan tugas SPIP lingkup satker pusat Ditjen PHL, pada tanggal 22 September 2021 dan tanggal 24 November 2021. Kegiatan ini diselenggarakan dengan pendampingan dari tim ALHP (Analisis Laporan Hasil Pengawasan) Sekretariat Itjen KLHK dan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### **h. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Prinsip “*No One Left Behind*” dalam SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dimaknai sebagai perjalanan bersama sejumlah negara untuk melanjutkan program pembangunan global yang sebelumnya telah dirintis dalam MDGs (*Millenium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Millenium). Salah satu program yang dicetuskan untuk dilanjutkan dalam SDGs adalah dari sektor sumber daya manusia, khususnya pada Kesetaraan Gender (tujuan SDGs kelima).

Hal ini menjadikan setiap negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan untuk menjamin pelaksanaan implementasi PUG dalam setiap kegiatannya, hal ini telah tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024.

Tujuan Pengarusutamaan Gender pada Ditjen PHL adalah :

- Memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkup Ditjen PHL telah secara adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki;
- Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan kualitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Memastikan bahwa seluruh jajaran Ditjen PHL memahami konsep, prinsip, dan strategi Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen PHL.

Pada tahun 2021 KLHK menyelenggarakan Festival Gender dengan rangkaian kegiatan yaitu GLEADS (Gender Leadership Class) untuk para pimpinan satker, dengan maksud membangun komitmen; TEACH (Training for Ecogender Activation Hub) bertujuan mencetak Gender Champion yang diikuti oleh peserta perwakilan satker lingkup KLHK termasuk peserta dari Ditjen PHL; PESTA (Pekan Ecogender dan Pelestarian Alam), serta GENERATION (Gender Competition) yang diikuti oleh satker pusat maupun daerah, termasuk satker di lingkup Ditjen PHL.

Puncak acara Festival Gender diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2021 bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti. Acara ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Festival Gender, yang diselenggarakan sejak bulan Juni 2021 dalam rangka percepatan implementasi pengarusutamaan gender dengan tujuan untuk transformasi netral gender menjadi nature gender.

Pada acara puncak yang bertajuk PESTA (Pekan Eco Gender dan Pelestarian Alam) tersebut, diumumkan peraih penghargaan Wanakalya Wirapaksi, yaitu pemenang GENERATION (Gender Mainstreaming Competition), baik untuk lingkup Pusat maupun Daerah (UPT).

Untuk lingkup UPT penghargaan terdiri dari 5 kategori, yaitu kategori Inovasi, Sarana-Prasarana, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender), SDM dan Lembaga Teraktif, serta Komitmen dan Kebijakan Pimpinan.

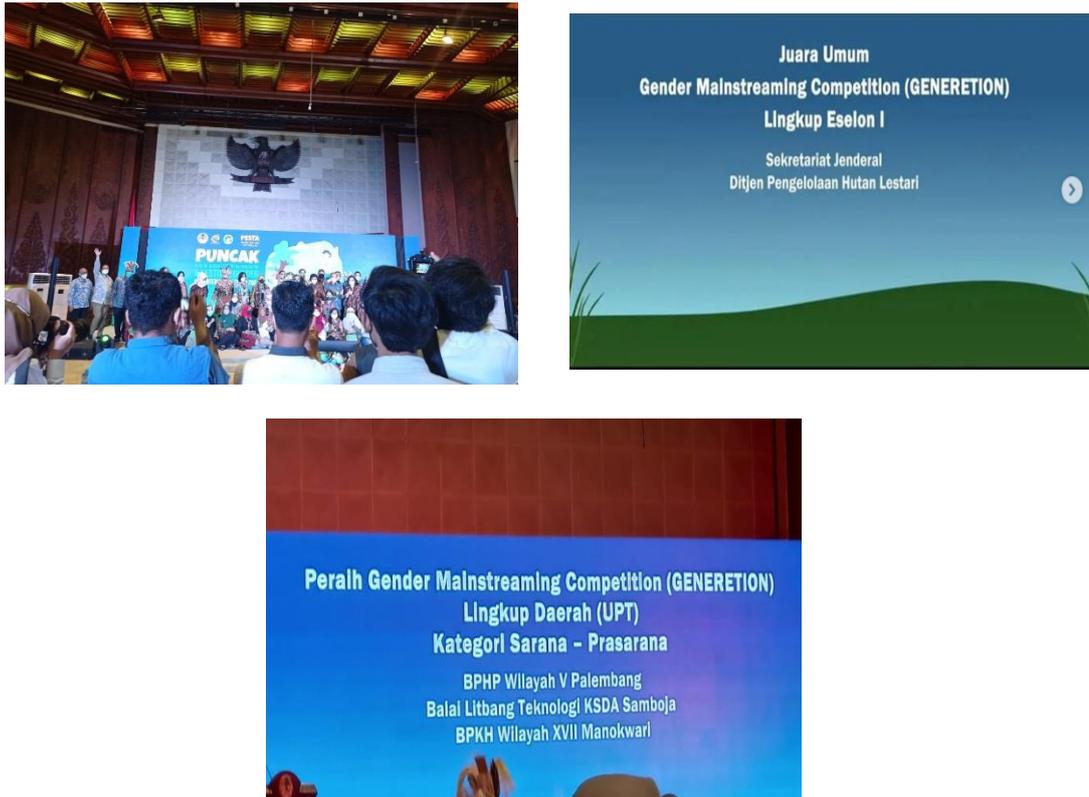
Enam BPHP berhasil meraih penghargaan pada kategori :

1. Sarana Prasarana : BPHP Palembang
2. PPRG : BPHP Palangkaraya, BPHP Samarinda, dan BPHP Denpasar.
3. Komitmen dan Kebijakan Pimpinan : BPHP Manokwari dan BPHP Aceh

Lima kategori penghargaan untuk lingkup Pusat (Eselon I) adalah Inovasi, Kelembagaan, PPRG, SDM dan Lembaga Teraktif, serta Komitmen dan Kebijakan Pimpinan. Ditjen PHL berhasil meraih penghargaan pada kategori PPRG dan SDM & Lembaga Teraktif.

Dengan capaian tersebut Ditjen PHL dianugerahi sebagai Juara Umum GENERATION. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ibu Menteri LHK dengan didampingi Bapak Wakil Menteri, kepada Direktur Jenderal PHL.

Gambar 10. Puncak Festival Gender KLHK 2021



Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHL diantaranya :

- *Coaching Clinic* Pendalaman GAP GBS 2021 dan Penyusunan GAP GBS 2022

Untuk memantapkan implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari, dan mempersiapkan wawasan dalam menghadapi kebijakan penandaan ganda anggaran perubahan iklim yang responsif gender, Sekretariat Ditjen PHL menyelenggarakan kegiatan *coaching clinic* penajaman GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*), pada tanggal 31 Agustus-1 September 2021.

Kegiatan *coaching clinic* dilaksanakan dengan fasilitator dari tim MFP 4. Melalui kegiatan ini diharapkan Ditjen PHL turut mendukung strategi Nasional pengarusutamaan gender, melalui pelibatan kegiatan perencanaan pengelolaan hutan di sektor hulu, sampai ke kegiatan pendampingan SVLK bagi UMKM di sektor hilir.

Gambar 11. *Coaching Clinic* Pendalaman GAP GBS dan Penyusunan GAP GBS 2022



#### i. **Penyusunan Buku Jejak Tapak dan Diskusi Publik**

Dalam rangka merangkai segenap daya dan upaya Ditjen PHL mengelola hutan produksi yang beriringan dengan pemulihan ekonomi masyarakat, telah disusun buku Jejak Tapak: Meraih Asa di Masa Pandemi, Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari. Buku Jejak Tapak sekaligus sebagai upaya memberikan kesempatan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif utuh mengenai berbagai upaya Ditjen PHL menjaga iklim usaha kehutanan di masa krisis.

Untuk mendiseminasikan informasi yang tertuang dalam buku Jejak Tapak, pada tanggal 28 September 2021 Ditjen PHL menyelenggarakan peluncuran buku dan diskusi publik "Jejak Tapak: Meraih Asa di Masa Pandemi, Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari" di Studio Metro TV Jakarta.

Direktur Jenderal PHL menyampaikan upaya menjaga iklim usaha kehutanan dilakukan melalui perbaikan regulasi, insentif kebijakan, sampai dengan intervensi anggaran. Hal ini untuk memberikan dukungan dalam menjaga produktivitas sektor kehutanan secara terpadu baik di hulu, hilir, maupun pasar, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Disamping itu Dirjen PHL menambahkan bahwa sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, paradigma usaha kehutanan akan berubah terkait pengelolaan tingkat tapak dengan tidak hanya mementingkan segi ekonomi.

Diskusi publik ini juga menghadirkan narasumber yaitu Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, Ketua KTH Nyungen Jaya Samarinda, dan Direktur Pemberitaan Media Indonesia.

Gambar 12. Diskusi Publik 28 September 2021



#### **j. Permohonan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2021 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan yaitu:

- Permohonan data dan Informasi oleh Sdri. Kartika Dewi TM (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdri. Dalila Doman (2 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Soelthon Gussetya Nanggara (4 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdri. Asti Maulita (2 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Kiki Taufik (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Ir. Hendy Immanuel Sibuea (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Rahmadha Syah (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Deden Pramodya (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdri. Nurchalis Patty, SS (3 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Franky Samperante (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdri. Caecilia Yulita Novia (2 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Berlian Bakti (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Zulfandi Lubis, SH (1 permohonan)
- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Muhammad Taufiq (1 permohonan)

Seluruh permohonan data dan informasi dapat dipenuhi dengan baik, tanpa menimbulkan sengketa informasi.

Gambar 13. Grafik Permohonan Informasi Publik Ditjen PHPL Tahun 2021

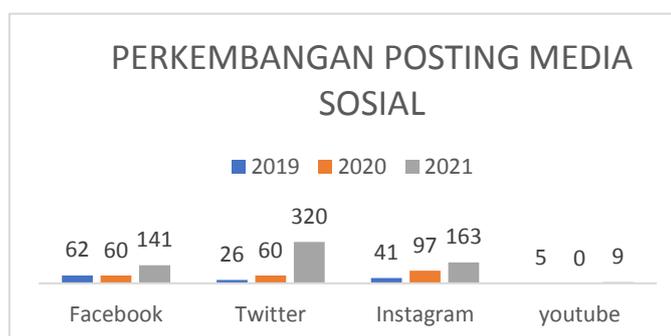


### k. Pengelolaan Media Sosial

Penyebarluasan informasi positif Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ditempuh melalui 3 (tiga) akun media sosial yang dikelola oleh Tim Pengelola Web Media Sosial lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu :

- Facebook (*Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*) sebanyak 141 post/repost Berita dan Video
- Twitter (*@DitjenPHPL*) sebanyak 320 tweets/retweets Berita dan Video
- Instagram (*@ditjenPHPL*) sebanyak 163 post/repost Berita dan Video
- YouTube (*Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari*) sebanyak 9 video

Gambar 14. Grafik Postingan Media Sosial Ditjen PHL Tahun 2021



### I. Buletin dan Buku Statistik Ditjen PHPL

Penerbitan Buletin Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari bertujuan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan Buletin PHL Edisi IX Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 1 (kali) dengan judul " Solusi Ketahanan Pangan Berkelanjutan".

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari juga telah menyusun buku statistik tahun 2020 yang bertujuan untuk mempublikasikan data-data mengenai pembangunan kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari yang terangkum secara komprehensif dari bulan Januari hingga Desember 2020. Data dan informasi yang terangkum di dalam buku statistik ini merupakan hasil pemutakhiran data dan informasi yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2020 yang diperoleh dari berbagai sumber data dan informasi. Beberapa data disajikan secara *time series* sejak tahun 2015 hingga 2020.

Gambar 15. Buletin PHPL Edisi IX/2021



### m. Pembuatan Video

Pembuatan Video kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 15 (lima belas) video sebagai berikut:

- Remaking Video - Banishing Bureaucracy (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Remaking Video - Reduced Impact Logging (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Remaking Video - Silvikultur (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Remaking Video - Indonesia's Timber Legality - Assurance System (SVLK) (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Remaking Video - Kompilasi HHBK (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Remaking Video - Voice of SVLK Stakeholder (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Remaking Video - FLEGT yang terbaru (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Remaking Video - Keynote Speech By The Vice Minister Of Environment And Forestry On Business Forum Meeting At Expo 2020 Dubai (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
- Teaser Video Dashboard Ditjen PHL untuk Launching Dashboard PHL pada acara Rapat Koordinasi Teknis Ditjen PHL

- Video dengan judul Teknik Pengelolaan Pasca Panen Biji Kopi
- Video Menggali Rezeki Petani Kembangkan Vanili
- Video dengan judul Hari Anti Korupsi Dunia
- Video Penandatanganan Kerjasama Indonesia-Inggris
- Video Healing Forest
- Video KPHP Kahayan Tengah Produksi Kerajinan Rotan

Gambar 16. *Screenshot* video Ditjen PHL Tahun 2021



#### n. Dubai Expo 2020

Pada tahun 2021 kegiatan Festival/Pameran Kehumasan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Expo 2020 Dubai di Persatuan Emirat Arab yang mengusung tema Connection mind, Creating the future yang dilaksanakan pada 01 Oktober 2021 s.d 31 Maret 2022.
- Pelaksanaan Pameran COP-26 UNFCCC Pavilion Indonesia Di Manggala Wanabakti

## 2. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

### a. Pelayanan administrasi kepegawaian

Sebagai fungsi administrasi kepegawaian, selama periode tahun 2021 telah diberikan pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :

- Kenaikan Pangkat (KP)

Proses usulan kenaikan pangkat dibagi dalam 2 periode (April dan Oktober). Jumlah usulan kenaikan pangkat periode April 2021 sebanyak 77 usulan yang terdiri atas KP otomatis sebanyak 35 dan KP Pilihan 42. Jumlah usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2021 sebanyak 48 usulan yang terdiri atas KP otomatis sebanyak 9 usulan, KP pilihan sebanyak 38 usulan dan KP Penyesuaian Ijazah sebanyak 1 usulan.

Tabel 6. Kenaikan Pangkat Tahun 2021

NO	JENIS KENAIKAN PANGKAT	PERIODE		JUMLAH	KETERANGAN
		APRIL	OKTOBER		
1	KP Otomatis	35*)	9	<b>44</b>	*) sebanyak 1 orang yang BATAL karena sudah menjelang pensiun *) sebanyak 6 orang yang BATAL krn berkas tidak lengkap
2	KP Pilihan	42*)	38	<b>80</b>	
3	KP Penyesuaian Ijazah/Pencantuman Gelar	0	1	<b>1</b>	
		<b>77</b>	<b>48</b>	<b>125</b>	

- Alih Tugas

Proses alih tugas diperuntukkan bagi pegawai lingkup Ditjen PHL yang akan alih tugas atas permintaan sendiri baik alih tugas dalam satu instansi maupun antar instansi. Permohonan alih tugas selama tahun 2021 telah diproses sebanyak 13 usulan.

Tabel. 7 Permohonan Alih Tugas

NO	ALIH TUGAS	JUMLAH
<b>1</b>	Alih Tugas lingkup Eselon I	8
<b>2</b>	Alih Tugas antar Eselon I lingkup KLHK	4
<b>3</b>	Alih Tugas ke Luar Instansi	1
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

- Pensiun

Usulan purna tugas / pensiun diperuntukkan bagi pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP), atas permintaan sendiri / pensiun dini, maupun meninggal dunia. Proses usulanpensiun selama tahun 2021 sebanyak 37 orang pegawai.

Tabel 8. Usulan Pensiun 2021

NO	JENIS PENSIUN	JUMLAH
1	Pensiun Normal/ BUP	29
2	Pensiun APS	0
3	Pensiun Janda/Duda	8
<b>TOTAL</b>		37

- Cuti

Salah satu hak pegawai adalah mendapatkan cuti. Adapun jenis-jenis cuti antara lain : Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Cuti Besar, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Selama periode tahun 2021 lingkup Ditjen PHL Pusat telah diproses permohonan cuti sebanyak 40.

Tabel 9. Cuti Tahun 2021

NO	JENIS CUTI	JUMLAH
1	Cuti Tahunan	31
2	Cuti Alasan Penting	5
3	Cuti Melahirkan	4
4	Cuti Sakit	0
5	Cuti Besar	0
6	CLTN	0
<b>TOTAL</b>		40

**b. Pembinaan Pegawai**

Kegiatan berupa pembinaan pegawai dan sosialisasi SKP dan PKPNS untuk seluruh pegawai lingkup Ditjen PHL Pusat dan UPT. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember di Ruang Auditorium Manggala Wanabakti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan budaya kerja dengan Implementasi *Core Values BerAKHLAK* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara **Bangga Melayani Bangsa**. Selain itu untuk memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penyusunan SKP dan penilaian KP tahun 2021.

Gambar 17. Pembinaan Pegawai Ditjen PHL 21 Desember 2021



### c. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan serta Administrasi Jabatan Fungsional

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya:

- Diklat pembentukan fungsional PEH tingkat ahli sebanyak 10 orang dan PEH terampil sebanyak 7 orang;
- Uji kompetensi bagi pejabat fungsional PEH yang akan alih jenjang;
- Pemberian tugas belajar/karyasiswa dan ijin belajar mandiri/swadana;  
Selama tahun 2021 telah diberikan ijin belajar sebanyak 4 orang atas nama Yoga Prayoga, S.Hut, Eko Novianto Nugroho Hadi, S.T., Chandra Kusuma Wardani, A.Md., dan Bakti Abu Birgantoro, S.Hut.
- Pencantuman Gelar  
Proses usulan pencantuman gelar diberikan kepada pegawai yang telah menyelesaikan studi setingkat lebih tinggi baik melalui tugas belajar (karyasiswa) maupun ijin belajar swadana. Selama tahun 2021 telah diproses usulan pencantuman gelar sebanyak 17 pegawai. Sebanyak 12 usulan sudah terbit SK penetapan pencantuman gelar, 3 usulan di tolak karena tidak memenuhi persyaratan dan 2 usulan masih dalam proses di BKN.
- Penilaian DUPAK dan rekomendasi kenaikan jabatan fungsional

Hasil penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim Penilai pusat akan di tetapkan dalam surat keputusan Penetapan Angka Kredit dengan mencantumkan rekomendasi untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Selama periode tahun 2021 telah diproses kenaikan jabatan fungsional binaan KLHK maupun binaan instansi lain sebanyak 55 orang, baik melalui jalur inpassing, penyetaraan, dan dari angka kredit.

#### **d. Pembahasan Petunjuk Teknis PEH**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor P. 74 tahun 2020 tanggal 9 November 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) maka perlu dilakukan pembahasan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan peraturan dimaksud.

Tujuan pembahasan juknis PEH ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada pejabat fungsional PEH dalam melaksanakan teknis kegiatannya baik administrasi, tata waktu maupun jenis kegiatannya.

Pembahasan Juknis PEH dilaksanakan secara faktual dan virtual pada tanggal 8-9 Desember 2021 bertempat di Bogor, dengan melibatkan perwakilan dari seluruh eselon I lingkup KLHK yang membidangi jabatan fungsional dan narasumber dari Biro Hukum dan Kemenpan RB.

Gambar 18. Rapat Juknis PEH

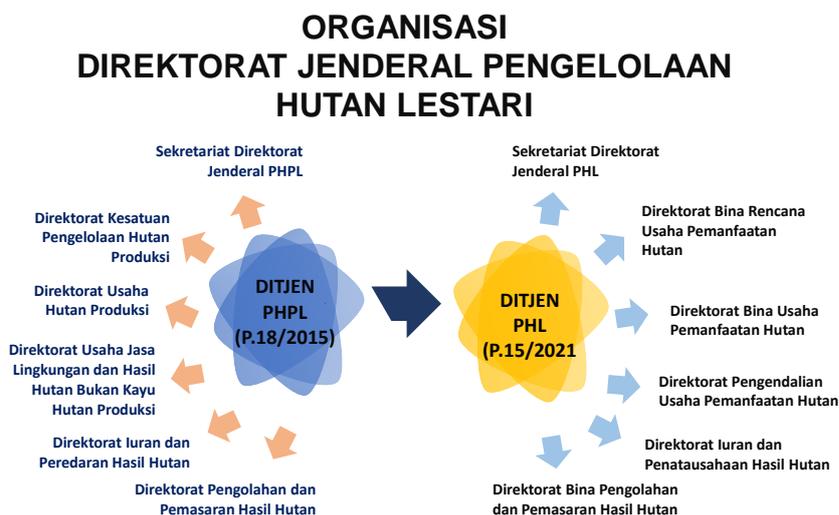


#### **e. Penyiapan Bahan Perumusan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) merupakan unit organisasi yang membantu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Sebagai tindaklanjut atas terbitnya peraturan tersebut telah disusun bahan untuk perumusan tugas dan fungsi, organisasi serta tata kerja untuk unit organisasi di lingkup Direktorat Jenderal PHL tahun 2020-2024. Dalam penyiapan bahan tersebut tidak terlepas dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (khususnya terkait dengan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung), Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sehingga unit-unit organisasi di Direktorat Jenderal PHL mengalami perubahan nomenklatur, uraian tugas dan fungsi, serta jumlah jabatan strukturalnya (jabatan administrasi). Rumusan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Direktorat Jenderal PHL telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambar 19. Struktur Organisasi Ditjen PHL Tahun 2021



2

## TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PHL (PemenLHK No. 15/2021)

**Tugas:** Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari

**Fungsi:** Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang:



### f. Penyiapan Bahan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

Sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri PAN & RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, telah disampaikan bahan usulan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal PHL. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Terdapat 60 (enam puluh) Jabatan Fungsional penyetaraan di lingkup Direktorat Jenderal PHL yang diusulkan, sebagai berikut:

- JF Perencana (jenjang Ahli Madya dan Ahli Muda) 2 orang
- JF Pranata Komputer (jenjang Ahli Muda) 1 orang
- JF Analis Kepegawaian (jenjang Ahli Muda) 2 orang
- JF Analis Perundang-undangan (jenjang Ahli Muda) 2 orang
- JF Analis Kebijakan (jenjang Ahli Madya dan Ahli Muda) 2 orang
- JF Arsiparis (jenjang Ahli Muda) 1 orang
- JF Analis Pengelola Keuangan APBN (jenjang Ahli Madya dan Ahli Muda) 4 orang
- JF Pengelola Barang/Jasa (jenjang Ahli Muda) 1 orang
- JF Pengendali Ekosistem Hutan (jenjang Ahli Madya dan Ahli Muda) 45 orang

### g. Penyiapan Bahan Evaluasi Kinerja Organisasi

Pada bulan September 2021 telah dilakukan evaluasi kinerja organisasi Kementerian LHK oleh Tim Evaluasi dari Kementerian PAN & RB, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk mendukung kegiatan evaluasi kinerja KLHK, telah disiapkan bahan untuk pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PHL yang berisi tindak lanjut evaluasi kinerja KLHK tahun 2020, capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PHL tahun 2021 dan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang masih dirasa belum sesuai dengan target serta menginventarisir aspek-aspek yang perlu dilakukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan:

- Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
- Pemerintah yang efektif dan efisien
- Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Gambar 20. Progres Reformasi Birokrasi Ditjen PHL

#### PROGRES REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PHL

##### 1. MANAJEMEN PERUBAHAN

- Tim PMPRB lingkup Ditjen PHPL → SK. Dirjen PHPL No. SK.10/2021
- Peningkatan Nilai PMPRB, Tahun 2019 → 31,80, Tahun 2020 → 34,19
- Penetapan Agen Perubahan → SK MenLHK No. SK.5/2021
- Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan di aplikasi sibude.id

##### 2. DEREGULASI KEBIJAKAN

- Identifikasi dan simplifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron, bersifat menghambat.
- Penyusunan rapemenLHK sebagai tindak lanjut UUCK No. 11/2020 dan PP No. 23/2021 → ditetapkan oleh Menteri LHK melalui PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021

##### 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

- Perubahan Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Ditjen PHPL menjadi Ditjen PHL (Perpres 92 Tahun 2020)
- Penataan & penyederhanaan birokrasi Ditjen PHL (dari P.18/2015 menjadi P.15/2021)
- Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional
- Usulan penataan organisasi UPT → BPHL Wilayah I s.d XVI

##### 4. PENATAAN TATA LAKSANA

- Penyesuaian proses bisnis lingkup DJ PHL dengan UUCK 11/2020, PermenLHK 8/2021 dan PermenLHK No.15 Tahun 2021 serta sudah mempertimbangkan penerapan pelayanan berbasis elektronik/sistem digital

##### 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

- Penyesuaian Evaluasi jabatan yang ada dengan SOTK KLHK yang baru (PermenLHK No. 15/2021) → Struktural 89 jabatan, Fungsional 15 jabatan, Pelaksana 33 jabatan

##### 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- Keterlibatan Pimpinan Unit Kerja dalam penyusunan perjanjian kinerja, renstra, kinerja, pencapaian kinerja dan pemantauan secara berkala
- Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan pemutakhiran data kinerja melalui website [phi.menthk.go.id](http://phi.menthk.go.id)
- Pencapaian Nilai Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2020 sebesar 114,33% dan Nilai Efisiensi 0,85 (kategori efisien)

##### 7. PENGUATAN PENGAWASAN

- Penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat Eselon II/Kepala Satker
- Money Kegiatan SPIP secara online melalui Simawas.itjen.menthk.go.id
- Pengusulan 2 (dua) satker lingkup Ditjen PHPL yaitu Setditjen PHPL (52,14) dan BPHP Wil.X Palangkaraya (43,32) untuk dinilai oleh TPI KLHK.

##### 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Perubahan Regulasi a.l Perizinan berusaha, sebagai tindak lanjut UUCK No. 11/2020
- Pengembangan sistem aplikasi untuk peningkatan pelayanan publik:
  1. Uji coba e-license pada SILK
  2. Pengembangan Sistem Informasi yang telah ada (web Ditjen PHL, SIPUJH, SILK, RPBI, SIPNBR dll)
  3. Peluncuran SIRPHJP & SIGANISHUT

#### h. Penyiapan Bahan untuk Penyusunan untuk Pedoman dan Prosedur Kerja

Penyusunan proses bisnis level 1-4 sebagai pedoman dan prosedur kerja, merupakan kewajiban bagi Direktorat Jenderal PHL sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Proses bisnis Direktorat Jenderal PHL yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, bertujuan untuk memberikan gambaran tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi dan menjadi panduan bagi seluruh Satker Lingkup Direktorat Jenderal PHL agar mampu mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi prosedur kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah.

### **i. Penyiapan bahan penyusunan analisa jabatan dan analisis beban kerja**

Dalam rangka revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 946 tahun 2019 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian LHK Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal PHL telah menyampaikan hasil penyusunan analisa jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkup Direktorat Jenderal PHL melalui Sistem Informasi Analisa Jabatan – Analisis Beban Kerja (<https://simpeg.menlhk.go.id/abk/>).

Dalam penyusunannya memperhatikan:

- Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK
- Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 74 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
- Peraturan-peraturan instansi Pembina antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, BAKN, BPS dan BAPPENAS yang mengatur jabatan fungsional yang menjadi binaanya

### **j. Penyiaian Bahan Penyusunan Evaluasi Jabatan**

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan di lingkup Direktorat Jenderal PHL telah disusun evaluasi jabatan. Dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS dan telah diusulkan serta dilakukan verifikasi oleh Biro Kepegawaian Kementerian LHK dan Tim dari Kementerian PAN & RB.

Untuk evaluasi jabatan sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 ini diusulkan ada kenaikan nilai jabatan dan kelas jabatan bagi Jabatan Administrator dan Pengawas.

## **3. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik**

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **a. Pembahasan dan Penyusunan Konsep Peraturan/Ketentuan Hukum Bidang Pengelolaan Hutan Lestari**

Peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan Hutan Lestari merupakan landasan bertindak untuk pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari negara berdasarkan hukum (*recht staat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*maacht staat*) sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang kemudian dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dimana didalamnya terdapat beberapa pasal yang dalam pelaksanaannya mengamankan untuk dibuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur bidang Pengelolaan Hutan Lestari antara lain bidang perizinan, perencanaan pemanfaatan hutan, penatausahaan hasil hutan, penatausahaan iuran hasil hutan, dan industri primer hasil hutan.

Guna menyusun peraturan tersebut di atas perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak-pihak terkait serta pembahasan draft agar peraturan yang akan dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan dari disusunnya peraturan tersebut.

Tabel 11. Peraturan Direktur Jenderal PHL Tahun 2021

No	Nomor	Tanggal	Perihal
1.	P.1/PHPL/SET.5/REN.1/2/2021	05-02-2021	Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021
2.	P.2/PHPL/SET.5/REN.1/10/2021	25-10-2021	Perubahan atas Peraturan Dirjen PHPL No.P.1/PHPL/SET.5/REN.1/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Karhutla dan Alat Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Mitra KPH
3.	P.3/PHPL/SET.5/REN.0/12/2021	07-12-2021	Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022

Tabel 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 Bidang PHL

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1.	P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2021	01-04-2021	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
2.	P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2021	02-10-2021	Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak/Pemegang Legalitas

#### b. FGD Permen LHK 8 Tahun 2021

Ditjen PHL sedang melakukan penyederhanaan proses terhadap perizinan yang saat ini ada, dan sebagai upaya nyata dalam penyederhanaan perizinan, Ditjen PHL mendukung Permen LHK 8 Tahun 2021 sebagai turunan Undang Undang Cipta Kerja.

Gambar 21. FGD Permen LHK 8 Tahun 2021



### **c. Bantuan Hukum dan Perdata Bidang Pengelolaan Hutan Lestari**

Pemberian bantuan/advokasi hukum kepada pejabat/pegawai/lembaga lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang digugat/diuji dalam Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan/atau Hak Uji Material Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dengan menghadiri persidangan-persidangan perkara perdata/TUN/HUM, baik di dalam kota Jakarta maupun di daerah, diantaranya :

- Membahas, menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses/tahapan-tahapan persidangan (jawaban gugatan, duplik, penyampaian bukti-bukti surat, kesimpulan, memori banding, memori kasasi, memori kontra banding, memori kontra kasasi, menghadirkan saksi-saksi);
- Memberikan pertimbangan hukum/pendapat hukum atas permasalahan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Terkait pemberian bantuan/advokasi hukum, pada tahun 2021, telah diberikan pelayanan advokasi hukum dalam beberapa perkara, antara lain :

- Penanganan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Lht Tanggal 14 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Lahat antara Syafarudin bin Cik Mat sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, Menteri LHK menang di Tingkat Pertama dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Penanganan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Lht Tanggal 14 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Lahat antara Syaiful Anwar bin Basir sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, Menteri LHK menang di Tingkat Pertama dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Penanganan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Plw Tanggal 14 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Pelalawan antara Houtman sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, Menteri LHK menang di Tingkat Pertama dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Penanganan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN.Jmb Tanggal 29 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Jambi antara WALHI sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, Menteri LHK menang di Tingkat Pertama dan dalam proses menunggu putusan banding di PT Jambi.

- Penanganan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Mbn Tanggal 29 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Muara Bulian antara Galileo Manalu sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, sedang berproses di Tingkat Pertama.
- Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 103/G/2021/PTUN-JKT Tanggal 19 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara ASOHAPEKA sebagai Penggugat melawan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, Direktur Jenderal PHL menang di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dan masih menunggu apakah ASOHAPEKA akan mengajukan Kasasi.
- Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 35/G/TF/2021/PTUN.PBR Tanggal 11 Juni 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru antara Masyarakat Adat Persukuan Olak sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, gugatan dicabut (telah berkekuatan hukum tetap).
- Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Juli 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru antara Samsari A.S. sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, pada Tingkat I Menteri LHK dikalahkan dan telah melakukan upaya hukum banding. Saat ini sedang menunggu putusan banding di PT TUN Medan.
- Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 215/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 6 September 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara PT. Ceria Karya Pranawa sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, sedang berproses pada Tingkat Pertama di PTUN Jakarta.
- Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 239/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 14 Oktober 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara PT. Sinar Kalbar Raya sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, sedang berproses pada Tingkat Pertama di PTUN Jakarta.
- Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 262/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 19 Nopember 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara PT. Sylvaduta Corporation sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebagai Tergugat. Posisi terakhir perkara, sedang berproses pada Tingkat Pertama di PTUN Jakarta.

Terkait pemberian pertimbangan hukum/pendapat hukum atas permasalahan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, pada tahun 2021 telah disiapkan draft Nota Dinas dan surat yang berisi telaah hukum, antara lain sebagai berikut :

- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari hal Penyampaian Surat Ketua Yayasan Sultan Buton Pahlawan Oputa Yikoo dan Wa Ode Wau, Bau Bau Buton Sulawesi Tenggara.
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari hal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020.
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari hal Kepastian Beroperasional PT. Berkat Cahaya Timber.
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Usaha Hutan Produksi hal Petunjuk Kewenangan Penggantian Nama Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Izin yang diterbitkan oleh Bupati
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Usaha Hutan Produksi hal Mohon Arahan Terkait Usulan RKTUPHHK-HTI a.n. PT. Rimba Tanaman Industri di Kab. Batanghari Provinsi Jambi
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan hal Penilaian Permohonan Perluasan Usaha Pengolahan Hasil Hutan (Perluasan PBPHH) a.n. CV. Sari Alam Mulia di Provinsi Jambi.
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan hal Penilaian Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) a.n. PT. Chandra Mega Utama.
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi hal Tindak Lanjut Permohonan Perizinan

Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi atas nama PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi hal Tindak Lanjut Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi atas nama PT. Puji Sempurna Raharja di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari hal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020 atas nama PT. Alco Timber Irian.
- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari hal Tindakanlanjut Hasil Evaluasi Kinerja Industri Tidak Aktif dalam rangka Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian IPHHK atas nama PT. Masari Dwisepakat Fiber (PT. MDF).
- Surat Direktur Jenderal PHPL kepada PT. Matuari Waya Sejahtera hal Penolakan Permohonan Pengembalian Dana Pengganti Nilai Tegakan (PNT).
- Surat Direktur Jenderal PHPL kepada PT. Nusantara Abdi Jayaland hal Penolakan Permohonan Pengembalian Dana Pengganti Nilai Tegakan (PNT).

Gambar 22. Tahapan Penanganan Perkara pada PTUN



#### d. Partisipasi pada *Event* Internasional

Dalam rangka mendukung kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya tupoksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen PHL ikut berpartisipasi pada beberapa pertemuan bilateral/regional/multilateral/ internasional. Hal ini dilakukan sebagai representasi institusi maupun representasi negara, untuk turut menghadiri *event* internasional dalam rangka memberikan kontribusi yang nyata dalam mengawal kepentingan Indonesia terkait bidang PHL.

Tabel 12. Partisipasi Ditjen PHL pada *Event* Internasional Tahun 2021

No	Kegiatan	Negara	Waktu
1.	<i>United Nations Forum on Forests ke-16 (UNFF16)</i>	Virtual Meeting, Jakarta	26-30 April 2021
2.	<i>The 5th EU-Indonesia Joint Committee</i>	Virtual Meeting, Jakarta	22 Juni 2021
2.	<i>The 16th ASEAN Working Group on Forestry Management</i>	Virtual Meeting, Jakarta	06 Juli 2021
3.	<i>The 31th Global Forum on Forest Governance</i>	Virtual Meeting, Jakarta	12-13 Juli 2021
4.	<i>20th Meeting of the APEC Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT)</i>	Virtual Meeting, Jakarta	13-14 Agustus 2021
2.	<i>Expo 2020 Dubai</i>	Dubai, Uni Emirat Arab	08 - 14 Oktober 2021
3.	<i>COP-26 UNFCCC</i>	Glasgow, Inggris	01 - 12 November 2021
6.	<i>ITTC-26</i>	Virtual Meeting, Jakarta	24 – 26 Juni 2021
7.	<i>Joint Implementation Committee EU FLEGT-VPA</i>	Bandung, Indonesia	17 – 21 Desember 2021
8.	<i>Training Bambu</i>	Virtual Meeting	Desember 2021

#### e. Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama Dalam Negeri merupakan salah satu langkah guna mendukung Ditjen PHL untuk pencapaian Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL dalam kaitannya dengan anggaran, kemampuan teknis dan teknologi.

Sepanjang tahun 2021, Ditjen PHL telah melakukan kerjasama Dalam Negeri dengan Universitas Brawijaya.

Pada tanggal 11 Februari 2021 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) dengan Universitas Brawijaya tentang Peningkatan Aneka Produksi Hutan Lestari. Perjanjian ini ditandatangani oleh Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan

Prof. Dr. Ir. Moch Sasmito Djati, MS., IPU selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Universitas Brawijaya.

Adapun tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan efektivitas pertukaran informasi dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Ditjen PHL dan Universitas Brawijaya.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman, industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu meliputi:

- Pertukaran data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan;
- Optimalisasi pengelolaan KHDTK;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka agroforestry dan Multiusaha di kawasan hutan.
- 

#### **f. Kerjasama Luar Negeri**

Dalam rangka mengisi kesenjangan dan mendukung Ditjen PHL untuk pencapaian Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan, Ditjen PHL turut didukung dengan melaksanakan Kerjasama Luar Negeri.

Pada tahun 2021, kerjasama luar negeri bidang PHL masih berlangsung diantaranya dengan mekanisme hibah terencana (Forest Investment Programme) dan mekanisme hibah langsung barang dan jasa (ITTO, FAO, MFP4). Uraian kegiatan kerjasama adalah sebagai berikut:

##### *- Forest Investment Programme Tahap II*

Forest Investment Programme (FIP) merupakan salah satu dari program kolaborasi antara multilateral development bank (MDBs) dan negara-negara penyandang dana dalam mendukung upaya negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari, konservasi hutan dan peningkatan penyimpanan karbon hutan.

Dalam program tahap kedua FIP mengusung project *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development* (Mendorong Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 13/Sekjen/ROKLN/KLN.0/3/2020 tanggal telah ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai *Executing Agency* dan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagai Pelaksana Harian Proyek II *Forest Investment Programme*.

Nilai hibah sebesar USD 17.350.000 dari World Bank dan USD 5.070.000 dari DANIDA, terangkum dalam lembaga donor International Bank for Reconstruction and Development dengan Nomor Hibah TF0A2104 dan TF0A2858 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2022, yang terdistribusi kedalam 13 *Implementing Agency*, yaitu:

- Direktorat KPHP-Ditjen PHPL;
- Direktorat RPP-Ditjen PKTL;
- Pusdatin-Setjen KLHK;
- Pusdiklat-Setjen KLHK;
- Direktorat BUPSHA-Ditjen PSKL;
- BPHP Wilayah 2 Medan;
- BPHP Wilayah 3 Pekanbaru;
- BPHP Wilayah 4 Jambi;
- BPHP Wilayah 5 Palembang;
- BPHP Wilayah 7 Denpasar;
- BPHP Wilayah 9 Banjarbaru;
- BPHP Wilayah 11 Samarinda;
- BPHP Wilayah 12 Palu.

Tujuan proyek untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam desentralisasi pengelolaan hutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis hutan pada lokasi terpilih 10 (sepuluh) KPH. Adapun lokasi kegiatan proyek tersebut yaitu 1) KPHP Mandailing Natal, Prop. Sumut; 2) KPHP Tasik Besar Serkap, Prop. Riau; 3) KPHP Limau, Prop. Jambi; 4) KPHP Lakitan, Prop. Sumsel; 5) KPHL Rinjani Barat, Prop. NTB; 6) KPHP Batulanteh, Prop. NTB; 7) KPHP Tanah Laut, Prop. Kalsel; 8) KPHP Kendilo, Prop. Kaltim; 9) KPHP Dampelas Tinombo, Prop. Sulteng; dan 10) KPHP Dolago Tanggulang, Prop. Sulteng.

- *ITTO Project*

ITTO (*International Tropical Timber Organization*) melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan nama "*Developing supply capacity of wood-based biomass energy through improve enabling condition and efficient utilization of degraded forest lands involving local communities in North*

*Sumatera Province in Indonesia*". Project ITTO ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan pada pasokan energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan pasokan energi biomassa berbasis kayu. Durasi project selama 48 bulan sejak 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan anggaran hibah sebesar USD 487,100.

Project ini merupakan kerjasama ITTO dan ISWA, dan yang bertindak sebagai *Executive Agency* adalah Direktur Usaha Hutan Produksi-Ditjen PHL.

Output dari proyek ini yaitu : 1) Pembangunan pasokan energi kayu yang berkelanjutan; 2) Tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan energi biomassa berbasis kayu; dan 3) Investasi dalam pengembangan industri energi berbasis kayu.

- *FAO Project*

FAO *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) Programme merupakan project yang didanai oleh FAO dengan nomor register 25ZE8NQA dengan satker penanggungjawab adalah Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Perjanjian proyek ditandatangani tanggal 24 Mei 2018 di Jakarta sebagaimana Naskah Perjanjian Nomor PGM/MUL/2015-2020/FLEGT oleh FAO Representatif Indonesia dengan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode 01 Juni 2019 yang diperpanjang sesuai dengan Amandemen No 1 sampai dengan 30 Desember 2021 dengan anggaran sebesar USD 2.400.000.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung proses VPA, menanggulangi pembalakan liar, mendorong perdagangan produk kayu legal dan berkontribusi terhadap pengelolaan hutan secara lestari dan penurunan kemiskinan

Tabel 13. Kerjasama Bidang PHL Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Program	Executing Agency
1	<i>ITTO – ISWA "Developing supply capacity of wood based biomass energy through improved enabling conditions and efficient utilization of degraded forest lands involving local communities in North Sumatera"</i>	Mendukung pengembangan kapasitas energi biomassa kayu melalui peningkatan kondisi pemungkin dan penggunaan yang efisien dari lahan yang terdegradasi di Sumatera Utara	Dit. UHP

Tabel 14. Hibah Ditjen PHL Tahun 2021

Project	Kegiatan	Durasi Pelaksanaan	Sumber Dana	Lokasi
FIP-1	Community focused investment to address deforestation and forest degradation	2017-2021	Asian Development Bank (ADB)	Prov. Kalbar: 1. KPHP Kapuas Hulu Selatan, 2. KPHP Sintang Utara
FIP-2	Promoting sustainable community-based natural resources management and institutional development project	2017-2021	DANIDA dan WORLD BANK	1. KPH Panyabungan (SUMUT) 2. KPH Tasik Besar Serkap (RIAU) 3. KPHP Limau Hulu Sarolangun (JAMBI) 4. KPH Lakitan BC (SUMSEL) 5. BKPH PN Batulanteh (NTB) 6. BKPH Rinjani Barat Pea (NTB) 7. KPH Kendilo (KALTIM) 8. KPH Tanah Laut (KALSEL) 9. KPH Dampelas (SULTENG) 10. KPH DolagoTanggunung (SULTENG)
2	<i>FAO FLEGT Programme</i> (Tanggal 24 Mei 2018)	Mendukung kegiatan implementasi FLEGT di Indonesia	Dit. PPHH	
3	<i>Multistakeholder Forest Program 4 – MFP4</i> (Tanggal 16 Agustus 2018)	Mendukung perdagangan produk kayu legal dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mengurangi dampak perubahan iklim	Dit. PPHH	

#### 4. Bagian Keuangan dan Umum

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### a. Penanggulangan/Penanganan COVID-19

Telah dilakukan kegiatan penanggulangan/penanganan Covid-19 yang mengharuskan setiap individu melaksanakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Dalam rangka memenuhi protokol kesehatan Covid-19, Subbagian Perlengkapan telah melakukan penyemprotan disinfektan sejak Januari hingga Desember 2021 sebanyak 18 (delapan belas) kali untuk seluruh ruang kerja dan ruang rapat lingkup Ditjen PHL, penyediaan masker, sabun cuci tangan, *handsanitizer*, madu dan susu.

##### b. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN dan persediaan pada tahun 2021 adalah :

- Melakukan inventarisasi BMN lingkup Setditjen PHL;
- Membuat SK Penunjukan Penanggung Jawab dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional lingkup Setditjen PHL;
- Membuat Berita Acara Serah Terima atas peminjaman BMN yang bergerak;
- Membuat tanda terima pemakaian barang persediaan;
- Melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) barang persediaan;
- Mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN untuk 8 (delapan) unit BMN;
- Membuat Laporan BMN Audited Tahun 2020, Laporan BMN Semester I dan II Tahun 2021 Ditjen PHL, Laporan BMN Unaudited Tahun 2021 dan Laporan BMN Semester I dan II tahun 2021 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PHL;
- Membuat Laporan Barang Persediaan Tahun 2021 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PHL.

Gambar 23. Pengelolaan BMN Setditjen PHL



### c. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Tabel 15. Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN secara lelang

No	Kegiatan	Jenis BMN	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	SK Penghapusan
1	Lelang & Penghapusan	Mini Bus	1	103.300.000	SK.4388/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/6/2021 tanggal 10 Juni 2021
		Sepeda Motor	1	12.800.000	
		Sound System	1	281.705.000	
2	Lelang & Penghapusan	Peralatan & Mesin	241	1.725.615.772	SK.4494/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/6/2021 tanggal 16 Juni 2021
3	Lelang & Penghapusan	Sepeda Motor	1	12.800.000	SK.5274/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021
<b>Total</b>			<b>245</b>	<b>2.136.220.772</b>	

Tabel 16. Pemindah tanganandan penghapusan BMN melalui hibah ke Yayasan Pendidikan Jakarta

No	Kegiatan	Jenis BMN	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	SK Penghapusan
1	Hibah & Penghapusan	Mini Bus	1	29.700.000	SK.5309/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021
		Sedan	1	25.970.000	
<b>Total</b>			<b>2</b>	<b>55.670.000</b>	

### d. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan Undangan Nomor : UN.131/SET.5/KU/KAP.2/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Undangan Kegiatan Penyusunan RKBMN TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, pada tanggal 19-20 Agustus 2021 telah dilaksanakan penyusunan RKBMN TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal PHPL secara *online* yang diikuti oleh 16 (enam belas) Satker BPHP Wilayah I sd XVI dan 1 (satu) Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PHPL. Narasumber kegiatan dimaksud dari DJKN, Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekjen KLHK, yang dihasilkan Dokumen *Draft* RKBMN Lingkup Ditjen PHPL Tahun 2023.

**e. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN**

Dalam rangka tertib administrasi penataan dan pengelolaan BMN hasil tukar menukar tanah KLHK dengan PT PLN (Persero) untuk pembangunan PLTU di Kecamatan Jenu, yang mana aset pengganti diantaranya berupa tanah dan bangunan rumah dinas akan dioptimalkan pemanfaatannya melalui sewa, telah dilakukan upaya tindak lanjut dengan menyampaikan surat Sekditjen PHPL ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali II Nomor : S.620/SET.5/KU/KAP.3/8/2021 tanggal 22 September 2021 yang inti surat tersebut meminta pihak PT PLN (Persero) menindaklanjuti dokumen SPPT PBB atas aset pengganti hasil tukar menukar tanah KLHK dengan PT PLN (Persero).

**f. Penyusutan Arsip Ditjen PHL**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menata arsip inaktif yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Penyusutan arsip berupa kegiatan pemindahan arsip inaktif dari Unit Kearsipan 1 ke Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil dari kegiatan ini adalah Daftar arsip inaktif Ditjen PHL dan Berita Acara Serah Terima Arsip Inaktif nomor BA.25/SET.5/KU/SET.2/10/2021. Terdapat 84 boks (6977 nomor arsip) yang dipindahkan ke Unit Pusat Kearsipan KLHK.

**g. Pengelolaan Arsip Dinamis Ditjen PHL**

Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan atas penciptaan arsip sehingga dapat dikendalikan dan mengurangi biaya penciptaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Monitoring Surat Masuk dan Keluar Ditjen PHL Tahun 2021. Untuk surat masuk di lingkup Ditjen PHL berjumlah 6.000 dan untuk surat keluar di lingkup Ditjen PHL berjumlah 4.800 nomor surat.

**h. Pengamanan Arsip Ditjen PHL**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan arsip lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Cimanggis, Depok sebagai bentuk upaya menjaga dan mengamankan informasi dan fisik arsip agar tetap terpelihara dengan baik. Kegiatan ini berupa rapat koordinasi yang melibatkan Ditjen PHL, Biro Umum beserta Arsiparis yang dilakukan sebanyak 4 kali selama tahun 2021.

**i. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020**

Pada tahun 2021 telah disusun Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2020 Audited, Semester I Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun 2021. Berikut adalah

tabel perbandingan neraca periode Tahunan TA 2020 Audited, Semester I Tahun Anggaran 2021 dan periode Triwulan III TA 2021 sebagaimana pada Tabel 17. berikut:

Tabel 17. Neraca Keuangan Ditjen PHL

Uraian	Triwulan III 2021	Semester I 2021	Tahunan 2020 Audited
<b>Aset Lancar</b>	167,243,476,243	245,371,337,587	141,022,792,948
<b>Aset Tetap</b>	262,547,944,802	260,891,767,646	264,895,582,560
<b>Aset Lainnya</b>	1,408,037,045,532	1,407,748,360,634	1,407,757,026,199
<b>Jumlah Asset</b>	1,837,828,466,577	1,914,011,465,867	1,813,675,401,707
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	10,358,285,786	8,204,009,670	16,765,036
<b>Jumlah Kewajiban</b>	10,358,285,786	8,204,009,670	16,765,036
<b>Ekuitas</b>	1,827,470,180,791	1,905,807,456,197	1,813,658,636,671
<b>Jumlah Ekuitas</b>	1,827,470,180,791	1,905,807,456,197	1,813,658,636,671
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	1,837,828,466,577	1,914,011,465,867	1,813,675,401,707

#### j. Tindak Lanjut LHP Itjen / BPK RI

Pemutakhiran data tindak lanjut LHP sebagai laporan tindak lanjut audit investigasi Itjen telah dilaksanakan melalui rapat-rapat dalam rangka tindak lanjut LHP Itjen. Untuk tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Ditjen PHPL tahun 2020 beberapa temuan TUNTAS namun masih ada beberapa temuan yang masih dalam proses. Pada periode Semester II Tahun 2021 telah ditindaklanjuti temuan LHP BPK RI Tahun 2015 s.d. 2019. Adapun penyelesaian tindak lanjut berupa temuan administrasi berupa teguran kepada pelaksana kegiatan pada BPHP Wilayah II Medan, BPHP Wilayah IV Jambi dan BPHP Wilayah XV Jayapura. Temuan administrasi pada BPHP Wilayah II Medan dan BPHP Wilayah XV Jayapura telah berstatus tuntas. Untuk temuan tindak lanjut BMN masih dalam proses penyelesaian.

#### **k. Konsolidasi Pemutakhiran Data SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan**

Pada tahun 2021, pelatihan dan rekonsiliasi data internal SAK dan SAIBA dilakukan 3 (tiga) kali yaitu:

1) Periode Tahunan Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Januari 2021 dengan sistem *hybrid* melalui *virtual zoom meeting* dan tatap muka langsung. Adapun peserta terdiri dari operator SAIBA, operator SIMAK BMN dan operator Persediaan satker lingkup Ditjen PHL dengan materi penatausahaan BMN serta Analisis Transaksi Aset dan Persediaan pada aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAIBA.

Adapun permasalahan terkait rekonsiliasi tahunan yaitu:

- Terdapat persediaan belum diregister;
- Kesalahan pengklasifikasian akun aset;
- Pagu minus pada gaji.

Permasalahan di atas telah diperbaiki pada saat proses rekonsiliasi berlangsung.

2) Periode Semester I Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Juli 2021. Konsolidasi pemutakhiran data ini menggunakan *virtual zoom cloud meeting* dengan peserta yang terdiri dari operator SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan lingkup Direktorat Jenderal PHL.

Adapun permasalahan terkait rekonsiliasi Semester I yaitu:

- Pencatatan persediaan yang berasal dari hibah untuk KPH;
- Pencatatan aset dan persediaan.

Permasalahan di atas telah diperbaiki pada saat proses rekonsiliasi berlangsung.

3) Periode Triwulan III Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Bandung, dengan peserta yang terdiri dari KSBTU lingkup Ditjen PHL, operator SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan lingkup Direktorat Jenderal PHL. Adapun permasalahan terkait rekonsiliasi Triwulan III yaitu:

- Pagu minus;
- Kesalahan akun 53;
- Aset belum diregister;
- Pencatatan aset dan persediaan yang diserahkan ke masyarakat.

#### **C. IKK 2 : Level Maturitas SPIP Ditjen PHL**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan pedoman untuk instansi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan aset BMN, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

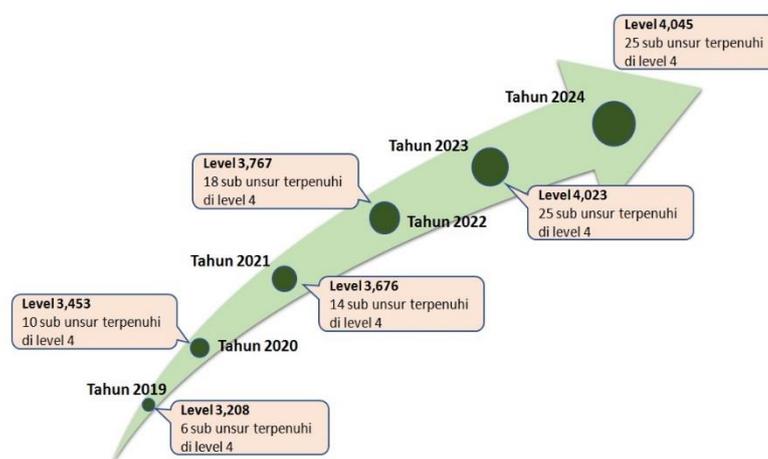
Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Kerangka maturitas SPIP terpolo dalam enam tingkatan yaitu level 0 (Belum Ada), level 1 (Rintisan), level 2 (Berkembang), level 3 (Terdefinisi), level 4 (Terkelola dan Terukur) dan level 5 (Optimum). Setiap tingkatan maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2020 sesuai surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor : S.117/ITJEN.SET/WAS.3/11/2020 tanggal 27 November 2020, Ditjen PHL memperoleh skor maturitas SPIP sebesar **3,4307** berada pada tingkat **“terdefinisi”**, naik 0,223 poin dibandingkan tahun 2019 (3,207).

Memperhatikan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, Kementerian menetapkan target tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP mencapai level 4 (Terkelola dan Terukur) pada tahun 2023, dan untuk mendukung tercapainya target Kementerian, maka Ditjen PHL juga telah menetapkan target tahunan tercapainya level maturitas SPIP sebagai berikut :

Gambar 24. Target Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024

#### Target Nilai Maturitas Ditjen PHPL Tahun 2019 - 2024



Sesuai rekomendasi dari Tim Itjen KLHK, kondisi yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di lingkup Ditjen PHL secara garis besar adalah :

- a) Melakukan evaluasi secara berkala, formal, dan terdokumentasi atas implementasi sistem pengendalian intern pada masing-masing sub unsur;
- b) Melakukan tindaklanjut yang optimal terhadap temuan pemeriksaan BPK agar tidak terdapat temuan yang material pada pemeriksaan berikutnya;
- c) Melaksanakan evaluasi terpisah;
- d) Melengkapi seluruh kegiatan utama dengan Rencana Tindak Pengendalian/rencana penanganan risiko;
- e) Meningkatkan kompetensi SDM dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPIP secara berkelanjutan serta secara berkelanjutan membangun *awareness* semua pihak untuk mengimplementasikan SPIP.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPKP, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari juga telah memfasilitasi diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.7/PHPL/SET.5/REN.2/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Evaluasi Secara Berkala, Formal, dan Terdokumentasi atas Implementasi SPIP lingkup Ditjen PHPL dan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.6/PHPL/SET.5/REN.2/9/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Pedoman Evaluasi Secara Berkala, Formal, dan Terdokumentasi atas Implementasi SPIP lingkup Ditjen PHPL.

#### **D. IKK 3 : Laporan Keuangan Ditjen PHL**

Pada tahun 2021 telah disusun Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2020, Semester I Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun 2021. Kualitas Laporan Keuangan yang baik adalah yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara, dan Laporan Keuangan Ditjen PHL senantiasa memberikan kontribusi positif pada opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut Ditjen PHL terus melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan, melakukan penguatan/pemahaman peraturan keuangan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan penguatan pengelolaan aset. Dengan sejumlah upaya yang dilakukan, pada tahun 2021 diharapkan Laporan Keuangan Ditjen PHL dapat kembali berkontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, dengan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-lima kalinya secara

berturut-turut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 (empat) tahun berturut-turut juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diperolehnya Maturitas SPIP level 4.

Tabel 18. Rekapitulasi Laporan Keuangan Ditjen PHL

Uraian	Triwulan III 2021	Semester I 2021	Tahunan 2020 Audited
<b>Aset Lancar</b>	167,243,476,243	245,371,337,587	141,022,792,948
<b>Aset Tetap</b>	262,547,944,802	260,891,767,646	264,895,582,560
<b>Aset Lainnya</b>	1,408,037,045,532	1,407,748,360,634	1,407,757,026,199
<b>Jumlah Asset</b>	1,837,828,466,577	1,914,011,465,867	1,813,675,401,707
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	10,358,285,786	8,204,009,670	16,765,036
<b>Jumlah Kewajiban</b>	10,358,285,786	8,204,009,670	16,765,036
<b>Ekuitas</b>	1,827,470,180,791	1,905,807,456,197	1,813,658,636,671
<b>Jumlah Ekuitas</b>	1,827,470,180,791	1,905,807,456,197	1,813,658,636,671
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	1,837,828,466,577	1,914,011,465,867	1,813,675,401,707

#### ➤ Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dan keseluruhan, seluruh elemen kegiatan untuk mewujudkan sasaran kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 100,00% **sama** jika dibandingkan dengan tahun 2020.

## E. Realisasi Anggaran

### 1. Perhitungan Anggaran

Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2021. Pada tahun 2021 anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp55.480.453.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp53.302.352.630,- (96,13%). Hasil perhitungan penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2021 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
1	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen PHPL	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	55.480.453.000	53.302.352.630	96,13
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari			
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan			
Jumlah/Rata-rata			55.480.453.000	53.302.352.630	96,13

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021 pada awal tahun anggaran adalah sebesar Rp. 62.158.430.000,- atau mengalami kenaikan anggaran sebesar 9,55% dibandingkan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 56.738.880.000,-. Walaupun demikian selama tahun 2021 berjalan dilakukan penghematan (*refocusing*) anggaran dari Kementerian Keuangan dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi COVID-19, hingga pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pasca *refocusing* menjadi sebesar Rp55.480.453.000,- atau berkurang anggaran sebesar 10,74% dibandingkan dengan pagu awal tahun 2021.

Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2021 sebesar Rp2.178.100.370,- (3,93%) adalah berupa :

- 1) Belanja Pegawai dikarenakan beberapa tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja pegawai yang tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan kekosongan pejabat di lingkup Kantor Pusat.
- 2) Sisa mati dari beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran.
- 3) Beberapa kegiatan perjalanan dinas pimpinan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan situasi pandemi Covid 19.

Capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 96,13%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 96,53%.

## 2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya menggambarkan perbandingan/rasio antara capaian realisasi anggaran (input) dengan capaian kinerja (output). Analisis efisiensi menjelaskan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi terhadap tingkat capaian kinerja dengan jumlah anggaran yang digunakan. Berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebesar 0,96 (rasio input : output = 96,13% : 100%). Hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada Tabel 18.

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setditjen PHL Tahun 2021

	Target	Realisasi	%
<b>Input</b>	Rp55.480.453.000,-	Rp53.302.352.630,-	<b>96,13</b>
<b>Output</b>	80 Poin	80 Poin	<b>100,00</b>
	Level 3	Level 3	<b>100,00</b>
	1 Laporan	1 Laporan	<b>100,00</b>
<b>Nilai Efisiensi</b>			<b>0,96</b>
<b>Kategori</b>			<b>Efisien</b>

Dari Tabel 20 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dibandingkan dengan jumlah anggaran yang digunakan, termasuk kategori **efisien** (nilai efisiensi < 1).

## BAB IV. PENUTUP

1. Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2021, didapatkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, terealisasi **80,00** (kategori **BB : Sangat Baik**), dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
  - b. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, terealisasi **Level 3** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
  - c. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terealisasi **1 Laporan** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
2. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2021 sebesar Rp55.480.453.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp53.302.352.630,- (96,13%).
3. Efisiensi sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebesar **0,96** dengan kategori **Efisien**.
4. Upaya untuk meningkatkan Nilai SAKIP yaitu :
  - a. Membangun komitmen pimpinan satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk mencapai target Renstra 2020-2024;
  - b. Menyusun perencanaan lebih matang dengan mempertimbangkan SDM, waktu dan biaya;
  - c. Meningkatkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
  - d. Melaksanakan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan;
  - e. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memantau permasalahan secara dini, sehingga dapat diupayakan pemecahan masalahnya.
5. Upaya untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP :
  - a. Mengidentifikasi dengan tepat permasalahan internal baik yang sifatnya signifikan dan tidak signifikan
  - b. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memantau permasalahan secara dini, sehingga dapat diupayakan pemecahan masalahnya.
  - c. Meningkatkan dokumentasi terhadap pengendalian intern

## LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Misran, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  
NIP. 19640930 198903 1 001

Ir. Misran, M.M.  
NIP. 19621212 199303 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**  
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen PHPL	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	80 Poin
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Level 3
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan

**Kegiatan :**  
 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan  
 Tugas Teknis Lainnya  
 Ditjen PHPL

**Anggaran :**  
 Rp. 62.158.430.000

Jakarta, Januari 2021

Plt. Direktur Jenderal  
 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Sekretaris Direktorat Jenderal  
 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,



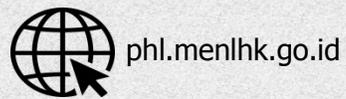
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  
 NIP. 19640930 198903 1 001



Iy. Misran, M.M.  
 NIP. 19621212 199303 1 001

## Matriks Rencana Pencapaian Target Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	2021		2022	2023	2024
		Target	Realisasi	Target	Target	Target
1	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	80 Poin	80 Poin	81 Poin	82 Poin	83 Poin
2	Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
3	Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan				



Ditjen Pengelolaan Hutan  
Lestari



@DitjenPHL



@DitjenPHL



Ditjen Pengelolaan Hutan  
Lestari